

DINAMIKA KEKUASAAN DALAM JARINGAN KEBIJAKAN KAWASAN BERORIENTASI TRANSIT

(Studi Kasus Dukuh Atas)

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis dinamika hubungan antaraktor dan relasi kekuasaan dalam implementasi Kebijakan Kawasan Berorientasi Transit (TOD) di Dukuh Atas, Jakarta. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus pada Jembatan Penyeberangan Multimoda (JPM) Dukuh Atas, penelitian ini dikaji melalui teori Jaringan Kebijakan R.A.W. Rhodes yang menekankan interdependensi sumber daya, ketergantungan kekuasaan, dan pola interaksi antaraktor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaringan aktor terdiri atas empat klaster: regulator pusat dan daerah, operator transportasi dan pengembang kawasan, serta komunitas sipil dan akademisi. Tidak ada aktor tunggal yang menguasai seluruh sumber daya, sehingga menciptakan interdependensi asimetris yang kompleks. Temuan utama mengungkap fenomena *jurisdictional stratification*, fragmentasi vertikal pusat-daerah, fragmentasi horizontal antarlembagaan teknis, dan ketiadaan payung hukum nasional yang komprehensif, yang menyebabkan kebuntuan koordinasi dan *governance without government*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hambatan utama implementasi TOD bukan terletak pada desain fisik, melainkan pada kapasitas institusional negara yang terfragmentasi. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat daya eksplanatif teori Rhodes dalam konteks desentralisasi Indonesia. Secara praktis, direkomendasikan penerbitan payung hukum nasional TOD, pembentukan otoritas tunggal pengelola kawasan, dan integrasi tiket antarmoda yang fleksibel.

Kata Kunci: Transit Oriented Development, Relasi Kuasa, Fragmentasi Kelembagaan, Dukuh Atas

POWER DYNAMICS IN TRANSIT-ORIENTED REGIONAL POLICY NETWORKS

(Case Study TOD Dukuh Atas)

ABSTRACT

This study analyzes the dynamics of inter-actor relationships and power relations in the implementation of the Transit-Oriented Area (TOD) Policy in Dukuh Atas, Jakarta. Using a qualitative approach with a case study of the Dukuh Atas Multimodal Pedestrian Bridge (JPM), this study is examined through R.A.W. Rhodes' Policy Network theory, which emphasizes resource interdependence, power dependence, and interaction patterns between actors. The results show that the actor network consists of four clusters: central and regional regulators, transportation operators and area developers, and civil society and academics. No single actor controls all resources, thus creating complex asymmetric interdependence. Key findings reveal the phenomenon of jurisdictional stratification, vertical fragmentation between central and regional governments, horizontal fragmentation between technical institutions, and the absence of a comprehensive national legal framework that leads to deadlocks in coordination and governance without government. This study concludes that the main obstacle to TOD implementation is not the physical design, but rather the fragmented institutional capacity of the state. Theoretically, this study strengthens the explanatory power of Rhodes' theory in the context of Indonesian decentralization. Practically, it is recommended to issue a national legal framework for TOD, establish a single authority for managing the area, and integrate seamless ticketing between flexibility

Keywords: Transit-Oriented Development, Power Relation, Policy Network, Institutional Fragmentation, Dukuh Atas